

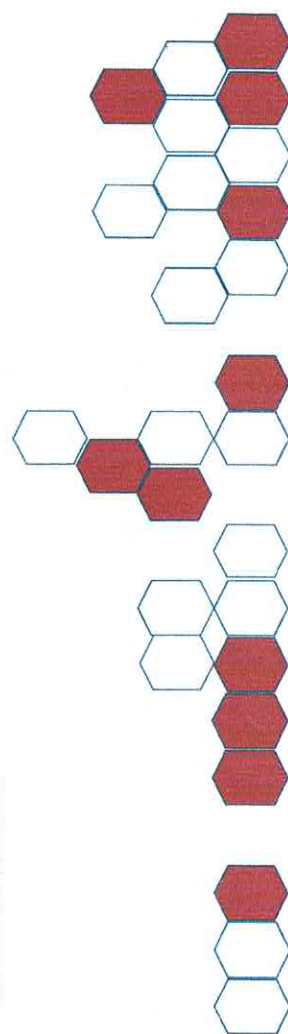
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN 2022



# LAPORAN KINERJA (LKJ) TAHUN 2021

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr wb...

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, SWT dengan segala rahmat dan karunianya Laporan Kinerja (LKj ) Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 telah selesai disusun. Penyusunan LKj ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan target kinerja organisasi perangkat daerah dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pesisir Selatan dan sumber dana lainnya (APBD Propinsi Sumatera Barat, APBN) Tahun Anggaran 2021. Dengan tujuan sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat, terciptanya system pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi serta diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik.

Penyusunan LKj Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2021 ini disusun berpedoman Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor Tahun 53 Tahun 2014.

Painan, Maret 2022

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Pesisir Selatan

  
DEVITRA SYAMSUNARDINI, S.T., M.M.

NIP. 19720101 199701 1 001

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, SWT dengan segala rahmat dan karunianya Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 telah selesai disusun..

Laporan Kinerja ( LKj ) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyajikan informasi tentang ukuran keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target kinerja dalam kurun waktu 1 (satu ) tahun anggaran 2021.

Hasil analisis dan evaluasi dari capaian indikator kinerja Sasaran Strategis yang telah diukur dalam Bab III, keberhasilan/kegagalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja tahun 2021, sebagai berikut :

**Tabel 1**

Hasil Analisis Dan Evaluasi Dari Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2021		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Sektor Unggulan yang Berkualitas	1. Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi terhadap rumah tangga	%	97,71	95,59	97,83

			di seluruh Kabupaten				
		2.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah	%	76,13	76,06	99,91
		3.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani jaringan irigasi	%	59,05	59,13	100,14
		4.	Tingkat kemantapan jalan Kabupaten	%	41,11	41,73	101,51

## **DAFTAR ISI**

### **KATA PENGANTAR**

### **DAFTAR ISI**

### **IKHTISAR EKSEKUTIF**

### **DAFTAR ISI**

### **DAFTAR TABEL**

### **DAFTAR GAMBAR**

## **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Dasar Hukum
- 1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah
- 1.5 Struktur Organisasi
- 1.6 Kepegawaian
- 1.7 Sistematika Penyusunan

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA**

- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Perjanjian Kinerja
- 2.3 Indikator Kinerja Utama

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- 3.1 Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja
- 3.2 Hasil Pengukuran Kinerja
- 3.3 Capaian Kinerja Perangkat Daerah
- 3.4 Akuntabilitas Keuangan

## **BAB IV PENUTUP**

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Saran

**Lampiran :** I. Perjanjian Kinerja Eselon II  
II. Prestasi-Prestasi



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Sebagai unsur pelaksana teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertugas mengembangkan dan memelihara Sarana dan Prasarana Wilayah yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Untuk itu Dinas menyusun rencana program dan kegiatan, baik yang bersifat jangka menengah maupun tahunan sesuai dengan kebutuhan dan perkiraan dana yang tersedia.

Pada Tahun Anggaran 2021, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai salah satu dinas penyelenggara urusan wajib yaitu urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dengan alokasi dana sebesar Rp. 193.050.440.752,- yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 11.891.789.690,- dan belanja langsung sebesar Rp. 181.158.651.062,- untuk mengelola sebanyak 11 Program dan 19 kegiatan. Dana program dan kegiatan prioritas yang diselenggarakan ini sesuai dengan PP No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan PP No. 3 Tahun 2008 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggara Pemerintahan Daerah kepada DPRD kepada Masyarakat paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir harus dilaporkan secara transparan dan akuntabel dalam bentuk LKjIP (Laporan Kinerja) Pemerintah Daerah. Bahan LKjIP ini selanjutnya menjadi masukan bagi Pemda dalam menyusun LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat.

### **1.2. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari Penyusunan LKj Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini adalah untuk dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat terhadap keseluruhan program dan kegiatan yang telah diselenggarakan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Sedangkan tujuannya adalah sebagai bahan masukan untuk dapat memperbaiki atau meningkatkan hasil kerja (kinerja) dinas pada tahun anggaran berikutnya, sehingga sasaran untuk meningkatkan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat dapat dicapai.

### **1.3. Dasar Hukum**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2021 disusun mengacu kepada peraturan perundangundangan yang mengaturnya antara lain :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021.

### **1.4. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Desa Sago – Salido, Kecamatan IV Jurai merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Pada tanggal 28 Oktober 2021, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan bergabung dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 136 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja dan uraian tugas jabatan struktural Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.

Saat ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan irigasi, sungai/pantai, jalan, penataan bangunan gedung,

penataan bangunan dan lingkungannya, sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta pembinaan konstruksi.

### **1.5. Struktur Organisasi**

Guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan tersebut, susunan organisasi dinas yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 136 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja dan uraian tugas jabatan struktural Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahi 3 (tiga) sub bagian sebagai berikut:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
  3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Bina Marga, membawahi 3 (tiga) seksi sebagai berikut:
  1. Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan;
  2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
  3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- d. Bidang Cipta Karya, membawahi 3 ( tiga ) seksi, sebagai berikut:
  1. Seksi Air Minum;
  2. Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman; dan
  3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
- e. Bidang Tata Ruang, membawahi 3 (tiga) seksi, sebagai berikut:
  1. Seksi Perencanaan Ruang;
  2. Seksi Pemanfaatan Ruang; dan
  3. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Ruang.

- f. Bidang Bina Konstruksi, membawahi 3 (tiga) seksi, sebagai berikut:
  - 1. Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi;
  - 2. Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi; dan
  - 3. Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi.
- g. Bidang Irigasi dan Rawa, membawahi 3 (tiga) seksi, sebagai berikut:
  - 1. Seksi Perencanaan Irigasi dan Rawa;
  - 2. Seksi Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi dan Rawa; dan
  - 3. Seksi Operasional dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa.
- h. Bidang Sungai dan Pantai, membawahi 3 (tiga) seksi, sebagai berikut:
  - 1. Seksi Perencanaan Sungai dan Pantai;
  - 2. Seksi Pengendalian, Pendayagunaan dan Konservasi Sungai dan Pantai; dan
  - 3. Seksi Operasional dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai.
- i. UPTD; dan
- j. Jabatan Fungsional.

Secara rinci, tugas pokok dan fungsi masing – masing unsur pejabat pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

### **Kepala Dinas**

Tugas :

- 1. Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan jalan, penataan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan, pembinaan jasa konstruksi serta pengelolaan Sumber Daya Air sesuai perundangundangan.

Fungsi :

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan urusan penyelenggaraan jalan dan jembatan, penataan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah dan drainase, pembinaan jasa

konstruksi, konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air serta ketersediaan air untuk irigasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- b. penyelenggaraan penataan ruang Daerah;
- c. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- d. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten;
- e. penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil);
- f. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- g. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang;
- h. pelaksanaan penelitian dan pengembangan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- j. pemberian rekomendasi terhadap izin yang berhubungan dengan pengendalian dan pendayagunaan sungai dan pantai;
- k. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengendalian dan pendayagunaan sungai dan pantai;
- l. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- m. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- n. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas;
- o. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
- p. pelaksanaan dukungan yang bersifat *substantif* kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

## **Sekretaris**

### Tugas :

1. melaksanakan administrasi dan penatausahaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, melaksanakan urusan perencanaan dan pelaporan Dinas.

### Fungsi :

- a. pengkoordinasian kegiatan bidang-bidang dan UPTD di lingkungan Dinas;
- b. pengkoordinasian rencana, program, anggaran, keuangan serta pelaporan Dinas;
- c. pengkoordinasian layanan administrasi dan ketatausahaan yang meliputi umum dan kepegawaian;
- d. pengkoordinasian pendataan dan informasi publik;
- e. pengkoordinasian pengelolaan aset/barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang jasa;
- f. penataan organisasi dan tata laksana; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

## **Kepala Bidang Bina Marga**

### Tugas :

1. Membantu kepala dinas menyiapkan rumusan serta menyelenggarakan urusan bidang jalan, jembatan, drainase dan penahan badan jalan yang meliputi: pengaturan, pembinaan, pendataan, perencanaan program, perencanaan teknis, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, rehabilitasi, pengawasan dan monitoring serta pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan.

### Fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Bina Marga;
- b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Bina Marga;
- c. pembinaan pelaksanaan tugas Bidang Bina Marga; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **Kepala Bidang Cipta Karya**

Tugas :

1. Mengelola penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah urusan keciptakaryaan.

Fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang cipta karya;
- b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang cipta karya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang cipta karya; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **Kepala Bidang Tata Ruang**

Tugas :

1. Membantu kepala dinas menyusun dan melaksanakan Kebijakan Daerah urusan penataan ruang yang meliputi penyelenggaraan penataan ruang daerah kabupaten.

Fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis urusan penataan ruang;
- b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Tata Ruang;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas Bidang Tata Ruang; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **Kepala Bidang Bina Konstruksi**

Tugas :

1. Membantu kepala dinas dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi pengaturan jasa Konstruksi, dan pengawasan jasa Konstruksi.

Fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengaturan jasa konstruksi, pengaturan jasa konstruksi, pemberdayaan jasa konstruksi, dan pengawasan jasa konstruksi;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan jasa konstruksi, pemberdayaan jasa konstruksi, dan pengawasan jasa konstruksi;
- c. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang pengaturan jasa konstruksi, pengaturan jasa konstruksi pemberdayaan jasa konstruksi, dan pengawasan jasa konstruksi;
- d. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang pengaturan jasa konstruksi, pemberdayaan jasa konstruksi, dan pengawasan jasa konstruksi;
- e. penyiapan bahan data serta menyusun dan menyiapkan laporan di bidang bina jasa dan konstruksi.
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan;

### **Kepala Bidang Irigasi Dan Rawa**

Tugas :

1. Membantu kepala dinas mendata, merencanakan, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan irigasi dan rawa.

Fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan, data base yang berbasis kinerja yang berhubungan dengan Irigasi dan Rawa;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang;
- c. pembagian tugas, memberi petunjuk atau arahan kepada bawahan di lingkup bidang;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **Kepala Bidang Sungai Dan Pantai**

Tugas :

1. Membantu Kepala Dinas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan di bidang sungai dan pantai sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan, data base yang berbasis kinerja yang berhubungan dengan sungai, pantai dan konservasi;

- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang;
- c. pembagian tugas, memberi petunjuk atau arahan kepada bawahan di lingkup bidang;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas)**

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dinas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dapat dibentuk UPTD pada Dinas sesuai dengan kebutuhan. Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **JABATAN FUNGSIONAL**

Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

Klasifikasi Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Klasifikasi Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang di tunjuk diantaratenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.

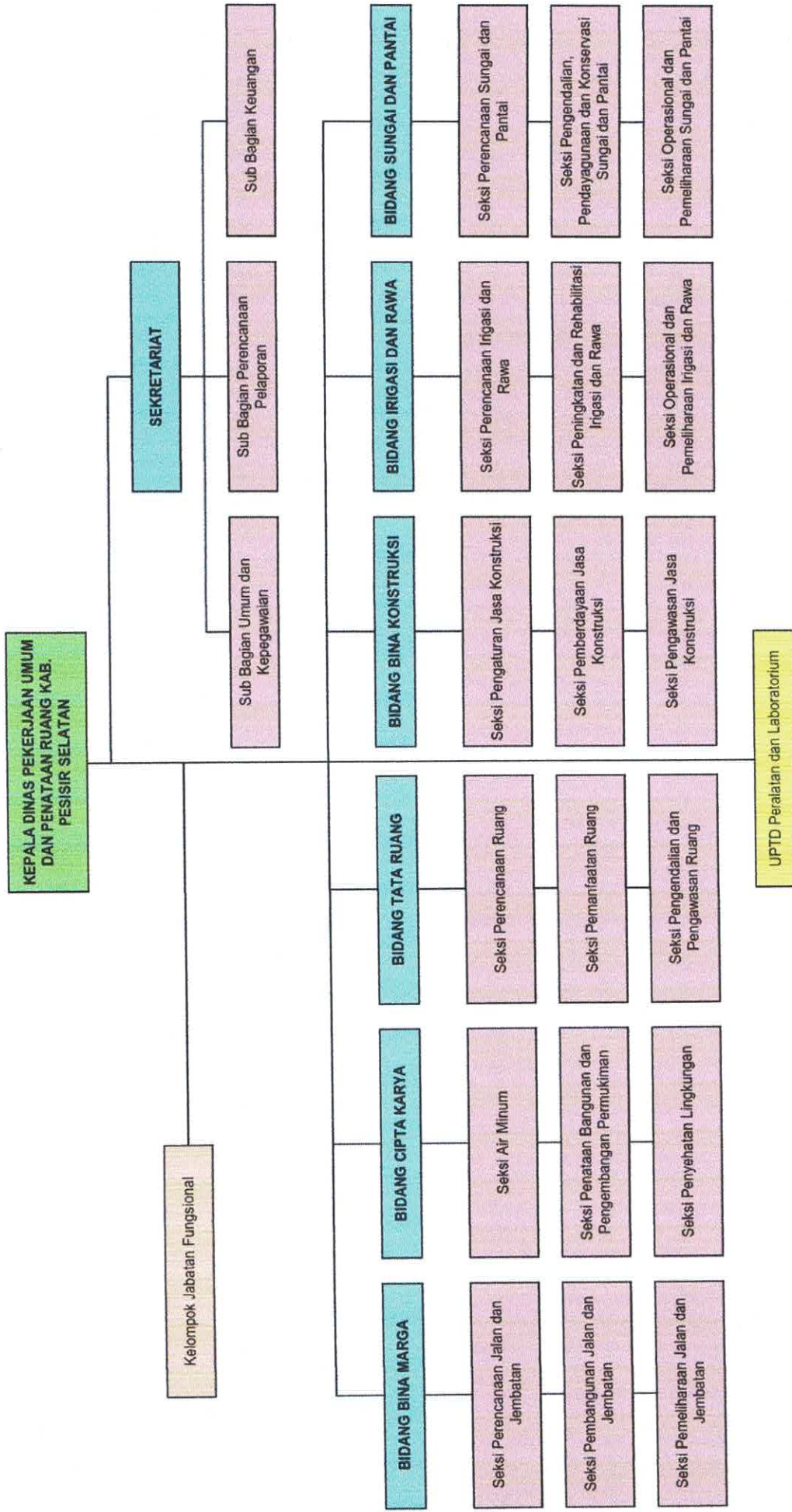
Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ditetentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.



# STRUKTUR ORGANISASI



## DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan

## 1.6. Kepegawaian

Dalam melaksanakan pekerjaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember Tahun 2021 di laksanakan oleh 106 (Seratus Enam) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari 86 (Delapan Puluh Enam) orang laki – laki atau 81,13 % laki – laki dan 20 (Dua Puluh) orang perempuan atau 18,87 % perempuan

**Tabel 1.1.**

**Data Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupten Pesisir Selatan Tahun 2021**

Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai	Persentase
Laki – laki	86 Orang	81,13 %
Perempuan	20 Orang	18,87%
Jumlah	106 Orang	100 %

*Sumber :*

*Bezetting Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan 31 Desember 2021*

Sedangkan berdasarkan jenjang pendidikan, Sumber Daya Manusia Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan didominasi oleh jenjang pendidikan S1.

**Tabel 1.2.**

**Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan Jenjang Pendidikan**

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	S2	9	8,49 %
2	S1	48	45,28%
3	D4	2	1,89%
4	D3	5	4,72%
5	SLTA	35	33,02%
6	SLTP	6	5.66%
7	SD	1	0,94%
	<b>Jumlah</b>	<b>106 Orang</b>	<b>100%</b>

*Sumber :*

*Bezetting Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan 31 Desember 2021*

## 1.7. Sistematika Penyusunan

Pada dasarnya Laporan Kinerja ( LKj ) ini berisi pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan selama tahun 2021 tentang capaian kinerja (*performance results*) tahun 2021 yang diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja/TAPKIN (*performance agreement*) Tahun 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja ( LKj ) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir selatan dan struktur organisasi serta tujuan penyusunan LKj
2. Bab II – Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan berbagai kebijakan umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan, Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 dan penetapan kinerja untuk tahun 2021
3. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2021.
4. Bab IV – Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa datang atau Tahun 2021.

## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

### 2.1. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya, diperlukan suatu perencanaan strategis melalui Penelaahan Visi dan Misi serta cara Pencapaian tujuan sasaran yang telah ditetapkan.

Dari kelima misi Kabupaten Pesisir Selatan yang tertuang dalam RPJMD 2016 - 2021, maka **misi kedua** adalah misi yang harus diemban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu ***“Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Perekonomian Dan Infrastruktur Sosial Yang Terkait Dengan Sektor Unggulan Daerah”***, dengan tujuan **mewujudkan pembangunan infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial dalam mendukung sektor unggulan daerah.**

Dari tujuan dan Misi kedua RPJMD 2016-2021 Kabupaten Pesisir Selatan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang digabung dengan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan meriviu Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama untuk Tahun 2021.

Sehingga Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran yang harus diemban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Misi, Tujuan dan Sasaran**

<p style="text-align: center;"><b>Visi :</b> <b><i>Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera</i></b></p>
--

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah	Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar	1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan	1. Persentase jalan kabupaten kondisi baik
		2. Meningkatnya infrastruktur pelayanan dasar	1. Persentase penduduk berakses air minum/bersih 2. Persentase Akses Sanitasi Layak
		3. Meningkatnya Kinerja Sistim Irigasi	1. Proposi Lahan Sawah Beririgasi Baik

## 2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 ditetapkan dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 yang telah diriviu.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan maupun sub kegiatan. Untuk itu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan telah membuat Perubahan Perjanjian Kinerja yang harus mengakomodir RPJMD 2016-2021 dan RPJMD 2021-2026.

**Tabel 2.2**

### **Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

**Tahun 2021**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Penunjang Ekonomi	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	95.59%
		Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik (%)	76.06%
		Proposi Lahan Sawah Beririgasi Baik (%)	59.13%
		Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik (%)	41.11%

### 2.3 Indikator Kinerja Utama

Pengukuran keberhasilan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan tercermin dari capaian Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka dipilih Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama satu tahun anggaran menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi yang disajikan dalam tabel berikut :

1. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi
  - a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

<b>Indikator Kinerja Kunci Keluaran</b>	<b>Rumus</b>	<b>Capaian Kinerja 2021</b>
Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	$\frac{\text{Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun, ditingkatkan, direhabilitasi, dioperasikan dan dipelihara (ha)}}{\text{Luas daerah irigasi kewenangan kab/kota (ha)}} \times 100\%$	$\frac{12.362}{20.907} \times 100\% = 59,13$

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

<b>Indikator Kinerja Kunci Hasil</b>	<b>Rumus</b>	<b>Capaian Kinerja 2021</b>
1) Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik (m)}}{\text{Panjang jaringan irigasi primer (m)}} \times 100\%$	$\frac{56.180}{69.000} \times 100\% = 81,42$
2) Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (m)}}{\text{Panjang jaringan irigasi sekunder (m)}} \times 100\%$	$\frac{69.784}{143.000} \times 100\% = 48,80$
3) Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik (m)}}{\text{Panjang jaringan irigasi tersier (m)}} \times 100\%$	$\frac{25.990}{60.840} \times 100\% = 42,72$

2. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

<b>Indikator Kinerja Kunci Keluaran</b>	<b>Rumus</b>	<b>Capaian Kinerja 2021</b>
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah kumulatif masyarakat (rumah tangga) yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam kota}}{\text{Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kota}} \times 100\%$	$\frac{102.866}{107.610} \times 100\% = 95.59 \%$

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

<b>Indikator Kinerja Kunci Hasil</b>		<b>Capaian Kinerja 2021</b>
1)	Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	Ada
2)	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	Ada
3)	Jumlah BUMD dan atau UPTD Kabupaten/Kota penyelenggaraan SPAM	Ada
4)	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	Ada
5)	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	Ada

3. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	$\frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk+jumlah rumah yang lumpur tinjanya dioleh di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\text{Jumlah rumah di kabupaten/kota}} \times 100\%$	$\frac{81.843}{107.610} \times 100\% = 76.06 \%$

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja 2021
1) Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S		78.215
2) Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T		3.628
3) Jumlah rumah		81.483

Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja 2021
dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T		
4) Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja		855
5) Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja		855
6) Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik		81.483
7) Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	$\frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tanki septic}}{\text{Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah}} \times 100\%$	$\frac{78.215}{44.736} \times 100\% = 174.84\%$

Indikator Kinerja Kunci Hasil		Rumus	Capaian Kinerja 2021
		terbangun <25 jiwa/ha	
8)	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	$\frac{\text{Jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah dioleh di IPLT}}{\text{Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALDS dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun >25 jiwa/ha}} \times 100\%$	$\frac{855}{60.197} \times 100\% = 1.42\%$
9)	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	$\frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\text{Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALDT}} \times 100\%$	$\frac{3.628}{29.455} \times 100\% = 12.32\%$
10)	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	$\frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat}}{\text{Jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S}} \times 100\%$	$\frac{78.215}{107.610} \times 100\% = 72.68\%$
11)	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	$\frac{\text{Jumlah sarana pengangkutan yang tersedia}}{\text{Jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan di kab/kota}} \times 100\%$	$\frac{1}{29} \times 100\% = 3.45\%$
12)	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	$\frac{\text{Jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia}}{\text{Jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan kab/kota}} \times 100\%$	$\frac{10}{252} \times 100\% = 3.96\%$
13)	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	$\frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD}}{\text{Jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD-T pada kab/kota}} \times 100\%$	$\frac{3.628}{3.843} \times 100\% = 94.40\%$

Indikator Kinerja Kunci Hasil		Rumus	Capaian Kinerja 2021
14)	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	$\frac{\text{Jumlah rumah yang tangki septiknya sudah disedot}}{\text{Jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S}} \times 100\%$	$\frac{855}{83.408} \times 100\% = 0.79\%$

4. Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021
Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota	$\frac{\text{Panjang jalan kewenangan kabupaten yang mantap}}{\text{Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{973,67}{2.333,18} \times 100\% = 41,73 \%$

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja 2021
1)	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kabupaten/Kota	2.333,18 km
2)	Panjang jalan yang dibangun	14,656 km
3)	Panjang jembatan yg dibangun	10 m
4)	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	11,737 km
5)	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	50 m
6)	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	73,628 km
7)	Panjang jembatan yang direhabilitasi	48 m
8)	Panjang jalan yang dipelihara	321,70 km
9)	Panjang jembatan yang dipelihara	389,70 m

## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan

Pengukuran Kinerja adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2021. Metode pengukuran kinerja digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.

Tabel 3.1

#### Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Gagal

### 3.2. Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran capaian target Indikator Kinerja Utama dan Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada tabel 3.2

Tabel 3.2

## Hasil pengukuran capaian target Indikator Kinerja Utama dan Sasaran Strategis

NO	MISI/TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2021		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
<b>MISI 2</b>						
<b><i>MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEREKONOMIAN DAN INFRASTRUKTUR SOSIAL YANG TERKAIT DENGAN SEKTOR UNGGULAN DAERAH</i></b>						
<b>Tujuan :</b>						
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Penyediaan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar.</li> <li>2. Terwujudnya Infrastruktur Air yang Berkesinambungan dan Berwawasan Lingkungan.</li> </ol>						
1.	Terwujudnya Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Sektor Unggulan yang Berkualitas	1. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten (%)	%	97,71	95,59	97,83
		2. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik (%)	%	76,13	76,06	99,91
		3. Proposi Lahan Sawah Beririgasi	%	59,05	59,13	100,14

		Baik (%)				
		Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik (%)	%	41,11	41,73	101,51

### 3.3. Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 sebagaimana tercantum pada tabel 3.2. selanjutnya pada sub bab ini disajikan analisis capaian kinerja Sasaran Strategis untuk mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan sebagai berikut :

#### 3.3.1. Tersedianya sarana prasarana air minum yang layak bagi masyarakat

Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten di hitung dengan menggunakan rumus di bawah ini :

$$\frac{\text{Jumlah kumulatif masyarakat (rumah tangga) yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam kota}}{\text{Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kota}} \times 100\%$$

Capaian indikator Persentase cakupan air minum/bersih tahun 2021 di peroleh dari data jumlah tambahan Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Tahun 2021 yaitu sambungan rumah PDAM tahun 2021, sambungan rumah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021 dan sambungan rumah Pamsimas Tahun 2021 yang berjumlah 102.866 buah rumah.

Mengacu pada renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021 berikut target yang ingin dicapai dalam indikator Cakupan air minum / bersih.

**Tabel 3.3.1.1**

**Target dan Realisasi Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten**

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Target Capaian (%)	85,37	89,29	91,02	92,47	96,16	97,71
2	Realisasi (%)	85,37	87,86	91,22	94,88	95,59	95,59

Hasil Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten pada tahun 2021 seperti terlihat pada gambar berikut :



**Foto 1**

***Pengembangan Jaringan Distribusi dan sambungan Rumah Nagari Lunang Tengah Tahun 2021***

Tabel 3.3.3.2

**Capaian Kinerja Indikator jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten Tahun 2017 s/d 2021**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Capaian				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	%	87.86	91.22	94.88	95.59	95.59	98.40	100.22	102.61	99.41	97.83

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian indikator Persentase Penduduk berakses air minum/bersih dalam pelaksanaan RPJMD masih dalam kategori sangat baik .

Faktor – faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prsarana pelayanan dasar masyarakat adalah :

1. Adanya pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan, terutama oleh PPTK. Setiap keterlambatan pekerjaan oleh pelaksanaan segera ditindaklanjuti dan dicari solusinya
2. Koordinasi dengan stakeholder intens dilakukan, khususnya dalam penyusunan perencanaan SPAM sehingga permasalahan terjadi karena sulitnya mencari sumber air dengan debit besar dan tidak menimbulkan konflik sosial. Untuk mengatasi permasalahan ini, survey awal kelokasi sumber perlu dilakukan dan koordinasi sampai ke level Nagari
3. Melalui pembentukan Pokja Sanitasi Kabupaten, Kita dapat berperan aktif dalam setiap kegiatan ke-Pokjaan sehingga pembinaan dan pendampingan terhadap pencapaian akses sanitasi Kabupaten Kota dapat terus ditingkatkan.
4. Disamping itu juga dibina hubungan antar instansi terutama yang terlibat langsung dalam pencapaian akses sanitasi terutama Dinas Kesehatan yang melakukan upaya peningkatan akses sanitasi melalui perubahan prilaku masyarakat yang biasa dikenal melalui program Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Program – program yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target indicator kinerja sasaran strategis meningkatnya Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat tahun 2021 dapat di lihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.3.3.3**

**Program yang mendukung pencapaian target indikator kinerja yang di tetapkan**

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (RP)	Capaian(%)
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	13.780.159.450,-	12.375.295.058,-	89,81

Program – program diatas tersebut di dukung oleh dana sebesar Rp. **13.780.159.450,-** terealisasi sebesar Rp. **12.375.295.058,-** atau **89,81%**. Ini berarti dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 terdapat efisiensi anggaran sebesar 10,19 % atau Rp. 1.404.864.392,-.

### 3.3.2. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Jumlah rumah tangga di Kabupaten Pesisir Selatan menurut data sebanyak 107.610 rumah. Untuk memenuhi standar pelayanan minimum yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat tentang pelayanan pengolahan air limbah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 telah melaksanakan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah yang terdiri dari pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah ( SPAL ) serta Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja di Kabupaten Pesisir Selatan.

Pada tahun 2021, jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah adalah 81.843 rumah yang tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik (%) dihitung dengan menggunakan rumus di bawah ini :

$$\frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk+jumlah rumah yang lumpur tinjanya dioleh di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya dioleh di IPALD}}{\text{Jumlah rumah di kabupaten}} \times 100\%$$

Mengacu pada renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021 berikut target yang ingin dicapai dalam indikator Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik.

**Tabel 3.3.2.1**  
**Target dan Realisasi Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Tahun 2021**

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Target Capaian (%)	58.18	58.42	58.54	58.80	59.00	59.20
2	Realisasi (%)	63.76	64.01	73.17	75.13	75.27	76.06

Hasil Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten pada tahun 2021 seperti terlihat pada gambar berikut :



### 3.3.3. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani jaringan irigasi

Proporsi Lahan Sawah Beririgasi Baik (%) di hitung dengan menggunakan rumus di bawah ini :

$$\frac{\text{Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun, ditingkatkan, direhabilitasi, dioperasikan dan dipelihara (ha)}}{\text{Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota (ha)}} \times 100\%$$

Capaian indikator Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani jaringan irigasi tahun 2021 di peroleh dari data jumlah Peningkatan, Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi serta Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun 2021.

Mengacu pada renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021 berikut target yang ingin dicapai dalam indikator Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani jaringan irigasi.

**Tabel 3.3**

**Target dan Realisasi Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani jaringan irigasi Tahun 2021**

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Target Capaian (%)	58.18	58.42	58.54	58.80	59.00	59.20
2	Realisasi (%)	58.32	58.45	58.54	58.81	59.03	59.13

Hasil Pelaksanaan kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2021 seperti terlihat pada gambar berikut :



**Tabel 3.4****Capaian Kinerja Indikator Proposi Lahan Sawah Beririgasi Baik Tahun 2017 s/d 2021**

Indikator Kinerja	Sat	Realisasi					Capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Proposi Lahan Sawah Beririgasi Baik	%	58.45	58.54	58.81	59.03	59.13	100.05	100	100.02	100.05	99.88

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian indikator Proposi Lahan Sawah Beririgasi Baik dalam pelaksanaan RPJMD masih dalam kategori baik .

Faktor – faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan meningkatnya pemenuhan kebutuhan irigasi kondisi baik adalah :

1. Adanya pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan oleh Direksi Pekerjaan sehingga setiap kendala dan permasalahan pekerjaan segera ditindaklanjuti dan dicari solusinya.
2. Koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait antara Direksi Pekerjaan dengan Pengamat dan Juru Pengairan serta kelompok masyarakat petani.

Program – program yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani jaringan irigasi tahun 2021 dapat di lihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.8****Program/Kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja yang di tetapkan**

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (RP)	Capaian(%)
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem	31.442.778.057	25.144.021.559	79,97

Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1.000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
--	--	--	--

Program/Kegiatan diatas tersebut di dukung oleh dana sebesar Rp. **31.442.778.057,-** yang terealisasi sebesar Rp. **25.144.021.559,-** atau **79,97%**. Ini berarti dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 terdapat efisiensi anggaran sebesar 20,03 % atau Rp. 6.298.756.498,-.

### 3.3.4. Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik

Panjang jalan kewenangan kabupaten di Kabupaten Pesisir Selatan sesuai Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2015 adalah sepanjang 2.333,18 km. Untuk capaian kinerja jalan kabupaten dengan kondisi baik harus didapatkan kondisi jalan yang mantap dengan peningkatan dan rehabilitasi serta pemeliharaan jalan yang pada tahun 2021 mencapai 973,67 km

Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik di hitung dengan menggunakan rumus di bawah ini :

$$\frac{\text{Panjang jalan kewenangan kabupaten yang mantap}}{\text{Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten}} \times 100\%$$

Mengacu pada renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021 berikut target yang ingin dicapai dalam indikator Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik.

**Tabel 3.3**  
**Target dan Realisasi Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik Tahun 2021**

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Target Capaian (%)	24.90	25.90	27.90	28.90	29.90	30.90

2	Realisasi (%)	24.90	27.08	27.87	28.23	29.55	41.73
---	---------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Tabel 3.6**

**Capaian Kinerja Indikator Persentase Panjang Jalan Status Kabupaten Dalam Kondisi Baik Tahun 2017 s/d 2021**

Indikator Kinerja	Sat	Realisasi					Capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	27.08	27.87	28.23	29.55	41.73	104.25	99.89	97.68	98.83	135.05

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian indikator Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik untuk tahun 2021 dalam kategori sangat baik.

Program yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis tingkat kemantapan jalan kabupaten antara lain dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.18**

**Program yang mendukung pencapaian target indikator kinerja yang di tetapkan**

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Program Penyelenggaraan Jalan	95.137.967.298	90.475.476.582	95,10

Program diatas tersebut di dukung oleh dana sebesar Rp. 95.137.967.298,- terealisasi sebesar Rp. 90.475.476.582,- atau 95,10 %. Ini berarti dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 terdapat efisiensi anggaran sebesar 4,90 % atau Rp. 4.662.490.716,-

### 3.4. Akuntabilitas Keuangan

Anggaran dan Realisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian

Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021, tercantum pada tabel berikut :

**Tabel 3.42**

**Anggaran dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan  
Yang Menunjang Sasaran Strategis**

NO.	PROGRAM	TAHUN 2021		
		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
		(Rp.)	(Rp.)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	13.780.159.450	12.375.295.058	89,81
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	12.164.979.666	3.712.903.365	30,52
3	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	31.442.778.057	25.144.021.559	79,97
4	Program Penyelenggaraan Jalan	95.137.967.298	90.475.476.582	95,10
<b>TOTAL</b>		<b>152.525.884.471</b>	<b>131.707.696.564</b>	<b>86,35</b>

*Sumber : Laporan Perkembangan Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2021*

Dari tabel 3.4 diatas dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Plafon anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 untuk menunjang pencapaian Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 sebesar **Rp. 152.525.884.471,-** terealisasi sebesar **Rp. 131.707.696.564,-** atau **86,35%**. Artinya dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian Sasaran Strategis terdapat sisa anggaran sebesar **13,65%** atau secara absolut sebesar **Rp. 20.818.187.907,-**.
- b. Sisa anggaran sebesar **Rp. 20.818.187.907,-** mencerminkan kurang akuratnya perencanaan dan penganggaran program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan

dan adanya refocusing anggaran yang dikarenakan dampak Covid – 19 tahun 2021 dan seharusnya sisa anggaran ini dapat dipergunakan untuk meningkatkan capaian indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa kinerja pada Bab III, Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021, yaitu :

- a. Dari Sasaran Strategis yang telah ditetapkan, terdapat beberapa Indikator Kinerja Utama ( IKU ) dengan nilai antara 97% sampai 101%, dan rata-rata nilai capaian indikator kinerja masing-masing sasaran adalah 99,85%, dengan nilai tertinggi adalah 101,51% yaitu indikator kinerja *“Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik”*. Sedangkan nilai terendah 97,83% yaitu indikator kinerja *“Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten”*

**Tabel 4.1**

**Pencapaian Kinerja Menunjang Sasaran Strategis Tahun 2021**

No	Program	Indikator	Capaian (%)
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten (%)	97,83
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik (%)	99,91
3	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Proporsi Lahan Sawah Beririgasi Baik (%)	100,14
4	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik (%)	101,51